

ABSTRAK

Dalam suatu perusahaan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, penetapan pengelola utama merupakan salah satu faktor penting yang menunjang lajunya suatu perusahaan di samping faktor-faktor lain seperti transparansi dalam audit keuangan, posisi struktural dan lain-lain. Penetapan pengelola utama dalam suatu perusahaan tidak dapat dilepaskan dari fakta politik dan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Belum tegaknya hukum nasional yang mengatur tentang kerjasama antar perusahaan dapat menimbulkan sengketa antara kedua perusahaan tersebut. Dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara apabila kerjasama kedua perusahaan tersebut menyangkut Sumber Daya Alam yang penting bagi Negara. Permasalahan pengelola utama bukan hanya sekedar menegaskan pihak yang menjadi pengelola utama, tetapi kebijakan maupun peraturan bersifat nasional. Sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan kerjasama yang kondusif dan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi analisis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini penetapan pengelola utama migas Blok Cepu dalam hal ini ExxonMobil secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya.

Sebagai acuan terhadap masalah penelitian digunakan teori-teori atau konsep-konsep serta pendapat para ahli yang dituangkan dalam kerangka pemikiran dalam bentuk premis mayor : Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Ekonomi Politik Internasional, Investasi, Kerjasama Internasional, Perjanjian Internasional, Kepentingan Nasional, Konsep Migas sedangkan premis minor : Kerjasama antara Pertamina-ExxonMobil, ExxonMobil dalam hal ini sebagai Investor, Eksplorasi Migas di Blok Cepu, Undang-undang Migas No.22 Tahun 2001, Perjanjian antara Pertamina-ExxonMobil untuk menyelesaikan masalah hukum dalam kontrak.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagai Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam , Indonesia perlu mempunyai satu kebijakan atau peraturan yang terstruktur secara komprehensif berkaitan dengan penetapan pengelola utama Migas tanpa membuat citra Indonesia buruk di mata Negara lain.

Sehingga kerjasama antara Pertamina-ExxonMobil dapat diatur dalam peraturan yang jelas dan tegas. Sehingga tidak merugikan kepentingan kedua perusahaan tersebut dan Negara serta diharapkan dapat menjadi sebuah preseden yang baik agar dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan kebijakannya mengakibatkan penetapan pengelola utama migas Blok Cepu dipandang telah melanggar peraturan-peraturan atau dinyatakan cacat hukum.

Kata kunci : *Kerjasama; Pengelola Utama Migas Blok Cepu Antara Pertamina-ExxonMobil.*